**POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME MENURUT PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Jonathan Suranta Martua**

**NPM: 208040052**

**Konsentrasi : Hukum P[dana**

**ABSTRAK**

Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang pada masa pemerintahan orde baru kerap dilakukan oleh para pemegang kebijakan yang notabene memiliki kekuasan dan kewenangan dalam membolak-balikan keadaan. Namun dewasa ini, praktik KKN memberikan peluas lebih terbuka apalagi sejak diterapkannya otonomi daerah muncul fenomena kasus KKN yang banyak ditemukan di Daerah. Untuk merubah hal tersebut, tentu diperlukan politik hukum dalam hal melakukan perubahan dalam pembangunan hukum nasional. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam terkait mengenai politik hukum pidana dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan identifikasi masalah sebagai berikut yaitu: 1) Bagaimana peranan politik hukum pidana dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme menurut perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia; 2) Bagaimana pengaturan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme menurut perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan politik hukum pidana dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme sangatlah diperlukan seperti halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang aman, tertib, adil, dan sejahtera. Pengaturan pembaruan hukum dalam pencegahan KKN di Indonesia harus sesuai dengan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya ada 5 (empat) langkah dan upaya dapat dikembangkan dalam melakukan pencegahan KKN di Indonesia ke depan yaitu melalui: 1) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pemberian perizinan; 2) Memperkuat upaya pencegahan KKN di dunia usaha; 3) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pengelolaan keuangan; 4) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi; dan 5) Memperkuat program pendidikan anti korupsi di setiap lembaga pendidikan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pencegahan, KKN.

***ABSTRACT***

*The practices of corruption, collusion and nepotism (KKN) which during the New Order government were often carried out by policy holders who in fact had the power and authority to turn things around. However, nowadays, the practice of KKN provides more open extension, especially since the implementation of regional autonomy, the phenomenon of KKN cases has emerged which can be found in many regions. To change this, of course legal politics is needed in terms of making changes in the development of national law. Departing from these problems, the author intends to examine in more depth related to the politics of criminal law in preventing corruption, collusion and nepotism by identifying the following problems, namely: 1) What is the role of criminal law politics in preventing corruption, collusion and nepotism from the perspective of criminal law reform Indonesia; 2) What are the arrangements for the prevention of corruption, collusion and nepotism according to the perspective of Indonesian criminal law reform.*

*Specifications research in this thesis is done by analytic descriptive illustrates a problem that is then assessed and analyzed with the use of primary law, secondary law and tertiary legal materials. The method used in this research is normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, either in the form of secondary data and primary data were analyzed with without using statistical formulas.*

*The results of the study show that the political role of criminal law in preventing corruption, collusion and nepotism is very much needed as is the case in the formation of laws and regulations that regulate criminal acts which aim to prevent and deal with a crime in order to create a safe, orderly, just and ethical Indonesian society. prosperous. Law reform arrangements in preventing KKN in Indonesia must be in accordance with legal reorientation and reform in accordance with the central socio-political, socio-philosophical and socio-cultural values ​​of Indonesian society which underlies social policies, criminal policies and law enforcement policies in Indonesia. There are at least 5 (four) steps and efforts that can be developed in preventing KKN in Indonesia in the future, namely through: 1) Strengthening efforts to prevent KKN in granting permits; 2) Strengthen efforts to prevent KKN in the business world; 3) Strengthening KKN prevention efforts in financial management; 4) Strengthen efforts to prevent KKN in law enforcement and bureaucratic reform; and 5) Strengthening anti-corruption education programs in every educational institution.*

*Keywords: Legal Politics, Prevention, KKN*

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 merupakan tonggak awal menuju Indonesia yang lebih baik, dimana salah satu agenda pemerintah adalah dengan melakukan perubahan dalam sistem hukum di Indonesia. Reformasi hukum telah dijadikan sebagai salah satu agenda utama. Hal itu dilandasi oleh keadaran bahwa sistem hukum yang dikembangkan selama masa orde baru bersifat represif dan hanya menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang korup.[[1]](#footnote-1)

Hal itu secara tegas dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa kondisi umum hukum di Indonesia telah memberikan peluang terjadinya praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Bahkan ditegaskan pula bahwa penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Pada masa reformasi, khususnya dalam periode pemerintahan 2009-2014, strategi pembangunan hukum nasional secara yuridis mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam BAB II huruf G Lampiran undang-undang tersebut dijabarkan bahwa upaya perwujudan sistem hukum nasional dalam era reformasi terus dilanjutkan dengan meliputi pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif, dan peningkatan keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembangunan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pasca reformasi, Pemerintah telah mampu melakukan perubahan dalam pembangunan hukum nasional, salah satunya adanya pembenahan sistem hukum yang kemudian menghasilkan adanya 4 (empat) kali perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pada saat itu merasakan bahwa faktor manusia bukanlah satu-satunya penyebab absolutisme kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Absolutisme telah dirasakan pula dalam susbtansi-substansi hukum yang mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga hal tersebut dapat terlihat pada permasalahan masih adanya praktek KKN sampai saat ini.

Praktek KKN yang pada masa pemerintahan orde baru kerap dilakukan oleh para pemegang kebijakan yang notabene memiliki kekuasan dan kewenangan dalam membolak-balikan keadaan, dimana dengan kewenangan tersebut dapat melakukan apa yang menurut mereka bisa dilakukan harus dilakukan, tetapi apa yang menurut mereka tidak perlu dilakukan, maka orang lain harus menurutinya.

Adanya praktek KKN dewasa ini masih berjalan, hal tersebut dapat dilihat pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana hal tersebut, ditandai dengan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Otonomi Daerah.

Terkait dengan fenomena KKN dan dengan perubahan sistem pemerintahan terdesentralisasi, terdapat potensi yang cukup luas bagi aparat pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat untuk terlibat secara intensif dalam berbagai praktik KKN. Desentralisasi telah membawa perubahan besar dalam hal kewenangan di Daerah. Perubahan kewenangan untuk mengatur semua aspek kehidupan pemerintahan di luar sistem keuangan negara, pertahanan dan keamanan, agama, hubungan luar negeri dan sistem peradilan[[2]](#footnote-2) Oleh karena itu, dapat dipahami kekhawatiran semua pihak yang menilai desentralisasi hanya memindahkan praktik KKN dari pusat ke tingkat daerah.[[3]](#footnote-3)

Praktik KKN nyatanya tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara antar Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bemegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Diterapkannya prinsip pembagian kekuasaan pemerintahan (*distribution of power*) sebagai ciri negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD 1945,[[4]](#footnote-4) merupakan upaya untuk membatasi dan mencegah kemungkinan penumpukan maupun penyalahgunaan kekuasaan oleh badan/lembaga atau pejabat penyelenggara pemerintahan. Dalam kaitan

Praktek nepotisme masih kerap dilakukan yang sudah menjadi rahasia umum dalam proses perekrutan pegawai baru, baik di instansi pemerintah, perusahaan pemerintah, maupun perusahaan swasta. Hal ini merupakan kecenderungan untuk mengambil harapan atau melihat kemungkinan untuk keuntungan pribadi yang terkait dengan kesempatan untuk melakukan tindakan terkait nepotisme.[[5]](#footnote-5)

Permasalahan KKN di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat diselesaikan. Berbagai tekad baru ditandai niat baik para pejabat di lingkungan lembaga pemerintahan negara yang dalam pernyataannya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menindak KKN secara tegas. Semua kemampuan bangsa merancangkan penerapan *Good Governent and Clean Govement* sebagai langkah keluar dari krisis yang bebas dari KKN. Melalui wakil-wakil rakyat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 1998 sampai tahun 2003 telah dibentuk instrumen hukum yang mengatur tentang KKN sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkritisasi dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.[[6]](#footnote-6) Hubungan antara hukum dan politik terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan baik dalam pembentukan maupun implementasinya. Dalam kontek pencegahan KKN, peran politik hukum sangatlah diperlukan seperti halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana.

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) atau Pembaruan Hukum Pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”. Dengan demikian, apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka berarti politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”.[[7]](#footnote-7) Sedangkan apabila dilihat dari aspek politik kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

* 1. Bagaimana peranan politik hukum pidana dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme menurut perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia?
  2. Bagaimana pengaturan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme menurut perspektif pembaruan hukum pidana Indonesia?

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

# Peranan Politik Hukum Pidana Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Menurut Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”.[[8]](#footnote-8) Sedangkan apabila dilihat dari aspek politik kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.

Politik Hukum merupakan suatu kajian di dalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu hukum dan ilmu politik. Hukum merupakan elemen yang tidak steril dari subsistem-subsistem elemen lainya khusunya politik. Politik mempengaruhi hukum pada saat pembentukannya, sedangkan ilmu politik harus tunduk pada ilmu hukum saat berlakunya. Menurut Mahfud MD, pengertian politik hukum merupakan *legal police* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan suau garis kebijakan hukum yang akan diterapkan pada suatu Negara.[[9]](#footnote-9)

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak di pakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Kemudian Sunaryanti Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasionalmenjelaskan bahwa politik hukum itu tidak terlepas dari pada realita social dan tradisional yang terdapat di Negara kita dan di lain pihak sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.[[10]](#footnote-10)

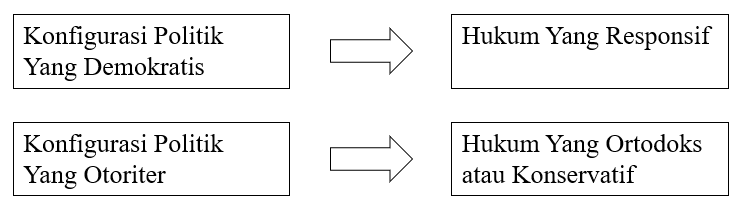
Berdasarkan pengertian politik hukum yang telah diberikan oleh ahli, maka dapatdi simpulkanbahwa politik hukum merupakan kebijakan hukum pemerintah dalam yang akan dikeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan seperti undang-undang, Perpu, PP, Perpres,Perda Pembentukan kebijakan hukum dijalankan oleh lembaga-lembaga berwenang untuk mengeluarkan kebijakan hukum berdasarkan cita Negara, cita hukum dan tujuan Negara yang terdapat dalam konstitusi pada suatu Negara atau hukum dasar yang di jadikan dasar rujukan dalam peraturan perundang-undangan.[[11]](#footnote-11)

Karakter produk hukum disamakan dengan sifat atau watak produk hukum, sebenarnya dapat dilihat dari berbagai sudut teoritis. Dalam studi tentang hukum banyak identifikasi yang dapat diberikan sebagai sifat atau karakter hukum seperti memaksa, tidak berlaku surut dan umum. Hukum mempunyai sifat umum, sehingga peraturan tidak ditujukan kepada seseorang dan tidak akan kehilangan kekuasaannya jika telah berlaku terhadap peristiwa konkret. Peraturan hukum juga mempunyai sifat abstrak, yakni mengatur hal halyang belum terkait dengan kasus-kasus konkret. Selain itu, ada yang mengidentifikasi sifat hukum kedalam sifat imperative dan fakultatif. Dengan sifat imperatif, peraturan hukum bersifat apriori harus ditaati, mengikat dan memaksa, sedangkan sifat fakultatif, peraturan hukum tidak secara apriori mengikat, melainkan sekadar melengkapi, subsidair dan dispositif.

Menurut Mahfud MD bahwa karakter produk hukum terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:[[12]](#footnote-12)

1. Produk hukum *Responsive/Populistik* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok social atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosil atau individu dalam masyakat.
2. Produk hukum *Konservatif/Ortodoks/Elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosialelite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideology dan program Negara. Berlawanan dengan hukum r*esponsive*, hukum *ortodoks*lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat.

Berbicara mengenai konfigurasi politik dan produk hukum, tentu harus berpijak dari asumsi bahwa politik determinan atas hukum sehingga hukum merupakan produk politik. Politik sebagai *independent variable* secara ekstrem di bedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai *dependent variable* dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum ortodoks. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.[[13]](#footnote-13)



Peran politik hukum sangatlah diperlukan seperti halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan peraturan yang mengatur tentang yang mengatur tentang tindak pidana, termasuk upaya pencegahan KKN di Indonesia.

Untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN, pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU No. 28 Tahun 1999 tersebut disahkan di Jakarta pada 19 Mei 1999 oleh Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie). Dalam pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara dituntut menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Praktik KKN tidak hanya mungkin dilakukan antar-penyelenggara negara tetapi juga antara penyelenggaraan negara dan pihak lain seperti keluarga, para pengusaha dan lainnya.

Adanya UU No. 28 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai upaya mencegah para penyelenggara negara dan pihak lain melakukan praktik KKN. Maka sasaran pokok UU tersebut adalah para penyelenggara negara, yang meliputi:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim di semua tingkatan peradilan
6. Pejabat negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan negara

Yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik KKN, antara lain:

1. Direksi, komisaris dan pejabat struktural lain pada BUMN dan BUMN
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara RI
5. Jaksa
6. Penyidik
7. Panitera pengadilan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, dalam UU No. 28 Tahun 1999 ditetapkan 7 (tujuh) asas umum penyelenggaraan negara, meliputi:

1. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

1. Asas tertib penyelenggaraan negara

Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

1. Asas kepentingan umum

Asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

1. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

1. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

1. Asas profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Asas akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya sanksi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban penyelenggara negara dan ketentuan lainnya. Sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu dan sosial. UU No. 28 Tahun 1999 mengatur sanksi bagi penyelenggara negara yang melanggar ketentuan. Jenis sanksi yang berlaku ada 3 (tiga) jenis yaitu sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Berikut ini sanksi dan denda yang akan dikenakan pada pelaku KKN, yaitu:

1. Sanksi pelaku korupsi

Pembahasan mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada 16 Agustus 1999 di Jakarta oleh Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie. Dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, akan mendapatkan sanksi berupa:

1. Pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun
2. Denda minimal RP 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar
3. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
4. Sanksi pelaku kolusi

Menurut Pasal 21 UU No. 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara yang melakukan kolusi akan dikenai sanksi berupa:

1. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun
2. Denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar
3. Sanksi pelaku nepotisme

Menurut Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara negara yang melakukan nepotisme akan mendapatkan sanksi berupa:

1. Pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun.
2. Denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar

Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata karena pencegahan dan penanggulangan korupsi bukan suatu pekerjaan yang mudah. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalkan keempat aspek penyebab korupsi yang telah dikemukakan sebelumnya. Strategi tersebut mencakup aspek preventif, detektif dan represif,yang dilaksanakan secara intensif dan terus menerus.

BPKP dalam buku SPKN yang telah disebut di muka, telah menyusun strategi preventif, detektif dan represif yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Strategi Preventif

Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Strategi preventif dapat dilakukan dengan:

1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya;
3. Membangun kode etik di sektor publik;
4. Membangun kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis;
5. Meneliti sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan;
6. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri;
7. Pengharusan pembuatan perencanaan stratejik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah;
8. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen;
9. Penyempurnaan manajemen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN);
10. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
11. Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional.
12. Strategi Detektif

Strategi detektif diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Strategi detektif dapat dilakukan dengan:

1. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat;
2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu;
3. Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik;
4. Partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di masyarakat internasional;
5. Dimulainya penggunaan nomor kependudukan nasional;
6. Peningkatan kemampuan APFP/SPI dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.
7. Strategi Represif

Strategi represif diarahkan untuk menangani atau memproses perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi represif dapat dilakukan dengan:

1. Pembentukan Badan/Komisi Anti Korupsi;
2. Penyidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar (*catch some big fishes*);
3. Penentuan jenis-jenis atau kelompok-kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas;
4. Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik;
5. Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus;
6. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu;
7. Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya;
8. Pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, PPNS dan penuntut umum.

Pelaksanaan strategi preventif, detektif dan represif sebagaimana tersebut di atas akan memakan waktu yang lama, karena melibatkan semua komponen bangsa, baik legislatif, eksekutif maupun judikatif. Sambil terus berupaya mewujudkan strategi di atas, perlu dibuat upaya-upaya nyata yang bersifat segera. Upaya yang dapat segera dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi tersebut antara lain adalah dengan meningkatkan fungsi pengawasan, yaitu sistem pengawasan internal (*built in control*), maupun pengawasan fungsional, yang dipadukan dengan pengawasan masyarakat dan pengawasan legislatif.

Menurut Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara adalah menggunakan hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Berikut ini peran serta masyarakat untuk mencegah KKN sesuai Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999 tersebut:

1. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.
3. Hak memperoleh perlindungan hukum.

Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan telah kronis. Zainuri mengungkapkan bahwa korupsi di negeri ini merambah semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi, tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi. Satu per satu skandal keuangan di berbagai instansi negara terbongkar.[[14]](#footnote-14)

Kajian tentang korupsi di Indonesia sudah banyak disampaikan kepada publik, baik melalui diskusi, seminar, hasil survei, media masa dan sebagainya. Salah satu kajian dan survei rutin tentang korupsi dilakukan oleh salah satu lembaga independen yaitu *Transparency International* (TI) pada tahun 2018. Hasil survei yang dilakukan oleh badan yang berwenang tersebut memberikan skor 38 (tiga puluh delapan) bagi Indonesia.[[15]](#footnote-15) Atas permasalahan tersebut, maka langkah yag paling tepat ialah melakukan pembaruan hukum pidana, khusus dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia.

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.[[16]](#footnote-16)

Makna dari pembaruan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada 2 (dua) fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana.

Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping usaha non penal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum.[[17]](#footnote-17)

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspeksosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Makna dan hakikat dari pembaruan hukum pidana dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:[[18]](#footnote-18)

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan
2. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
3. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupaka bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
4. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
5. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pembaruan hukum pidana dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari hukum pidana yang baik, adil, dan bermanfaat bagi manusia. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut sudarto, sedikitnya ada 3 (tiga) alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaruan hukum pidana Indonesia, yaitu:[[19]](#footnote-19)

1. Alasan Politis

Dalam konteks pencegahan KKN di Indonesia, dapat diketahui bahwa secara politis kebijakan pencegahan KKN di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kebijakan tersebut sebetulnya memang bagus sekali, namun kondisi saat ini komitmen aparat pemerintah, penegak hukum termasuk masyarakat (pengusaha, umum, dsb) masih terbilang lemah. Oleh karena itu, kedepan perlu ada suatu kebijakan yang baru dalam pencegahan KKN di Indonesia.

1. Alasan Sosiologis

Secara sosiologis, memang masalah korupsi sangat susah dicegah karena ada kaitannya dengan kultur masyarakat. Artinya ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kolusi dan nepotisme merupakan suatu budaya. Anggapan ini sama halnya terjadi di negara Jepang. Disana disebutkan bahwa suap dan gratifikasi khususnya merupakan suatu budaya masyarakat, sehingga pada saat adanya Konvensi PBB tentang Antikorupsi atau UNCAC di Wina, Austria, para delegasi negara Jepang lebih memilih walkout.[[20]](#footnote-20)

1. Alasan Praktik

Apabila melihat kenyataannya dalam praktik, tentu sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pencegahan KKN masih rendah dan lemah. Seolah-olah upaya pencegahan ini merupakan suatu yang sunat hukumnya. Aparat penegak hukum lebih tertarik pada aspek penanggulangan karena disanalah ada prestasi atau nilai secara ekonomis ketimbang melakukan pencegahan.

Dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu haruslah diketahui permasalahan pokok dalam hukum pidana. Hal tersebut demikian penting, karena hukum pidana yang berlaku secara nasional sebagaimana pendapat Sudarto diata selain itu juga merupakan cerminan suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bila nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga haruslah berubah.[[21]](#footnote-21)

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat dari pembaruan hukum pidana sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
2. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal subtance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi termasuk dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.

Usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan menurut perspektif politik hukum pidana dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu dengan sarana *penal* (hukum pidana), dan *non-penal* (*non* hukum pidana), yang dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan integratif dan bersinergi dengan kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan sosial. Terkait dengan penelitian ini adalah penggunaan sarana non penal, yakni pembuatan dan perumusan kebijakan hukum pidana pencegahan KKN yang baik, diharapkan tindak pidana korupsi dapat ditanggulangi dengan baik pula. Hal tersebut penting dilakukan mengingat ada beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan KKN di Indonesia sebagai berikut:

1. Kelemahan-kelemahan formulasi tindak pidana korupsi saat ini ialah kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi masih tersebar di beberapa perundang-undangan, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan.[[23]](#footnote-23)
2. Ekspektasi rakyat kepada pemerintah bukan hanya membentuk suatu aturan-aturan normatif semata, akan tetapi eksistensi pemerintah secara aktif dalam menciptakan suasana pemerintahan yang terbuka, berintegritas, dan segala kebijakan yang hasilnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu jabatan-jabatan penting di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dijabat oleh orang-orang yang mempunyai *softskill* dan *hardskill* yang baik, serta tidak menyalahgunakan otoritasnya untuk kepentingan pribadi.
3. Pemerintah dalam hal penanganan tindak pidana korupsi mempunyai usaha rasional melalui pendekatan upaya penal (*represif*) dengan pemberian sanksi kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Sehingga, pemberian sanksi terhadap tindak pidana korupsi merupakan reaksi atas perbuatan korupsi yang dilakukan. Namun demikian dalam proses penanggulangan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi tidak hanya menggunakan upaya penal yang cenderung reaktif, akan tetapi juga harus ada upaya *non-penal* dengan pendekatan *preventif* dengan jalan pencegahan seseorang melakukan tindak pidana.

Dengan demikian, maka penanggulangan KKN melalui *non-penal* harus dilakukan, karena sarana *penal* memiliki kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Sedangkan apabila ditinjau dari kejahatan sebagai sosial, maka banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangi seperti yang dikatakan sudarto bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan secara gejala (*Kuren am Symton*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Meniscayakan langkah-langkah penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal, maka proses perwujudannya melalui pendidikan yang mempunyai peran kunci.

Sarana *non-penal* memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh previntif terhadap kejahatan. Usaha-usaha *non-penal* ini, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, atau yang bersifat moralistik lainnya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya. Tidak kalah pentingnya mengenai meningkatkan usaha-usaha yang bersifat abolionistik, yaitu usaha-usaha yang dapat mengikis habis secara langsung faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan.

# Pengaturan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Menurut Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Upaya pembaruan hukum dalam pencegahan KKN di Indonesia sudah tidak dapat disangkal kembali, bahkan merupakan suatu keharusan (urgensi) untuk dilakukan secepat mungkin. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pembaruan hukum dalam pencegahan KKN di Indonesia seperti alasan politis, alasan sosiologis dan alasan praktik sebagaimana dijelaskan pada sub bab di atas, menunjukan pentingnya pembaruan hukum pidana dalam pencegahan KKN di Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat dari pembaruan hukum pidana sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

1. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
2. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
3. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal subtance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Dengan demikian, maka pembaruan hukum pidana dalam pencegahan KKN di Indonesia masuk pada semua aspek kebijakan baik kebijakan sosial, kebijakan nasional maupun kebijakan penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya pembaruan hukum pidana dalam pencegahan KKN merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, apabila melihat situasi dan kondisi saat ini.

Walaupun secara yuridis dan politik telah adanya komitmen dari seluruh komponen bangsa, meliputi komitmen seluruh rakyat secara konkrit, Lembaga Tertinggi Negara, serta Lembaga Tinggi Negara sebagaimana diwujudkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang pada pokoknya mengatur dan menetapkan berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya KKN seperti:

* + - 1. Memperkuat sarana dan prasarana hukum, dapat ditempuh melalui cara berikut:

1. Pembuatan Peraturan Perundangan Baru;
2. Penyempurnaan/Pencabutan Peraturan Perundangan;
3. Peraturan Perundangan Lain Yang Mendukung Upaya Penghapusan KKN.
   * + 1. Penyempurnaan Kelembagaan Penegak Hukum

Seorang pejabat negara harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan mampu mengembangkan manusia secara luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Dalam penegakkan hukum harus dibarengi dengan rasa kemanusiaan, agar menghindari adanya diskriminasi hukum bagi rakyat bawah.

* + - 1. Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat

Setiap warga negara dapat menyuarakan pendapatnya terhadap sebuah keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Langkah ini dapat diambil ketika masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemilu. Sehingga tindakan KKN dapat diminimalisir dengan adanya peran serta masyarakat secara langsung.

* + - 1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Pemerataan pelayanan secara adil dengan tidak membedakan status dan golongan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Transparansi pelayanan masyarakat dibutuhkan agar lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.

* + - 1. Peningkatan Kesejahteraan PNS, Poiri, dan TNI

Upaya penanggulangan KKN dengan cara menaikkan gaji pejabat atau aparatur negara hanyalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi, karena KKN akan tetap terjadi apabila kepribadian dari pejabat negara masih buruk. Dalam hal ini penting adanya pendekatan moralistis, nilai-nilai dan keyakinan dalam ajaran agama.

Namun yang menjadi permasalahan saat ini ialah praktik KKN masih saja marak dan tidak selesai-selesai di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa hambatan atas perwujudan pencegahan KKN di Indonesia disebabkan oleh:

1. Masih lemahnya profesionalitas dan integritas Dewan Perwakilan Rakyat untuk berkomitmen mencegah praktik KKN di lingkungannya maupun dalam hal pengawasan pada lembaga eksekutif. Artinya masih ada persekongkolan antara lembaga legislatif dengan eksekutif untuk melakukan praktik KKN;
2. Masih lemahnya profesionalitas dan integritas Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Hal tersebut dapat dibuktikan banyaknya hakim yang terseret kasus korupsi akibat praktik suap dalam menangani perkara;
3. Belum terbangunnya kode etik di sektor publik, sehingga masalah etika dan profesionalitas masih dipandang remeh oleh kalangan pejabat;
4. Masih belum terbangunnya kode etik di sektor Parpol, Organisasi Profesi dan Asosiasi Bisnis, sehingga kesemua sektor tersebut masih enggan untuk berkomitmen mencegah praktik KKN, faktor utamanya ialah tentu masalah ekonomi dan tuntutan gaya hidup yang mewah;
5. Belum adanya keseriusan berbagai kalangan termasuk dalam hal ini pembuat kebijakan dan akademisi untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh terkait sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan;
6. Belum sempurnanya pola manajemen sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri, sehingga dalam praktik kerja di lapangan, Pegawai Negeri masih memanfaatkan kewenangannya untuk mencari celah memperoleh keuntungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Salah satu cara yang sering terjadi ialah adanya persekongkolan antara Pegawai Negeri dengan pihak ketiga (pengusaha, penyedia jasa, dsb) dalam pengadaan barang dan jasa;
7. Kurang seriusnya instansi pemerintah dalam membuat suatu perencanaan stratejik dan laporan akuntabilitas kinerja, sehingga dalam pelaksanaan kerjanya masih belum terukur, tidak transparan, tidak akuntabel, dan tidak profesional;
8. Masih rendahnya kualitas sistem pengendalian manajemen dihampir setiap instansi pemerintah mengakibatkan rendahnya profesionalitas kinerja pegawai pemerintah yang apabila hal tersebut tidak dibenahi berakibat maraknya praktik KKN;
9. Kurangnya manajemen pengelolaan barang milik negara/daerah mengakibatkan rendahnya integritas pegawai negeri, sehingga berakibat borosnya pengeluaran keuangan negara/daerah, karena dijadikan sebagai bahan bisnis oleh pengelola barang milik negara/daerah;
10. Rendahnya kualitas pelayanan publik hampir dirasakan oleh setiap instansi pemerintah, hal tersebut tentu disebabkan oleh tidak profesionalnya kinerja pegawai. Keadaan tersebut sungguh memperihatinkan karena pelayanan publik dijadikan sebagai ladang usaha oleh oknum pegawai, sehingga timbullah praktik pungli, suap, gratifikasi, dsb;
11. Tidak adanya kampanye anti korupsi secara nasional secara serius. Walaupun dimana ada kampanye anti korupsi, hal tersebut masih dirasa sebagai semboyan saja tidak ada beban moral aparat dan pegawai negeri dalam menaati kampanye anti korupsi tersebut.

Politik hukum pidana sebagai bagian dari politik hukum mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil yang paling baik, yakni memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[[25]](#footnote-25) Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical detterents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[[26]](#footnote-26)

* + - 1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
      2. Tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
      3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Menurut G.P. Hoefnagels, suatu politik kriminal harus rasional.[[27]](#footnote-27) Hal tersebut merupakan konsekuensi logis karena pelaksanaan politik (kebijakan) orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi.[[28]](#footnote-28) Fakta empiris telah menunjukan, meskipun regulasi dibuat dan ditegakkan secara represif, namun perilaku korupsi tetap terjadi dari masa ke masa sampai dengan saat ini. Parahnya lagi, korupsi pada masa kini mempunyai daya rusak yang lebih besar dibandingkan dengan masa lalu. Hal tersebut disebabkan karena korupsi dilakukan oleh mayoritas para intelektual, sehingga tidak hanya berakibat pada timbulnya kerugian keuangan dan kekayaan negara semata, tetapi juga mengikis sendi-sendi kepribadian bangsa dan menghambat pembangunan.[[29]](#footnote-29)

Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berbicara tentang pencegahan kejahatan sesungguhnya menjadi domain ilmu kriminologi. Demikian halnya dengan pencegahan korupsi pelayanan publik maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kriminologi yang berada dalam bingkai kebijakan kriminal sehingga dapat diketahui akar masalahnya termasuk cara mengendalikannya.[[30]](#footnote-30)

Edwin H. Sutheralnd dan Donald R. Cressey, menyatakan bahwa ada 3 (tiga) cara mencegah kejahatan sebagai bagian dari kebijakan kriminal. (1) menjaga segregasi antara orang yang menunjukkan perilaku jahat dengan masyarakat di sekitarnya. (2) mengintegrasikan warga menjadi masyarakat yang taat hukum. (3) mendefinisikan kembali situasi sosial masyarakat yang dapat mendorong terjadinya kejahatan.[[31]](#footnote-31)

Menurut Steven P. Lab, pencegahan kejahatan dapat dibagi dalam 3 (tiga) pendekatan yakni primer, sekunder dan tersier. Pencegahan primer difokuskan pada pencegahan masyarakat yang dimulai dari lingkungan rumah tangga, tempat bekerja, hingga hubungannya dengan aktifitas di luar lingkungannya. Pencegahan sekunder, lebih condong pada upaya untuk mengidentifikasi dan memprediksi potensi terjadinya kejahatan dengan melihat realitas sosial. Sedangkan pencegahan tersier merupakan upaya untuk membuat semacam kesepakatan dengan pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.[[32]](#footnote-32)

Bertolak dari doktrin tersebut, dapat dikatakan bahwa manakala berbicara tentang pencegahan KKN pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari faktor pendorongnya dan proses penegakan hukumnya pasca kejahatan terjadi. Maka posisi aparat penegak hukum, peradilan yang efektif, dan hukum yang berwibawa dapat menjadi benteng kokoh untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Selain itu, peran serta masyarakat dan upaya responsif dalam mengidentifikasi potensi kejahatan oleh aparat penegak hukum menjadi poin yang tidak kalah pentingnya.[[33]](#footnote-33)

Berdasar pada uraian teori-teori di atas, maka perlu dicari formula dan terobosan terbaru guna menghilangkan KKN di Indonesia. Untuk itu, maka dalam penelitian ini penulis akan menawarkan suatu langkah atau upaya dapat dikembangkan dalam melakukan pencegahan KKN di Indonesia ke depan, antara lain:

1. **Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pemberian perizinan**

Perizinan harus menjadi fokus pencegahan KKN karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Praktik KKN di perizinan menghambat berusaha dan investasi, pertumbuhan ekonomi serta lapangan kerja. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan yang harus menjadi prioritas dalam pencegahan KKN dalam pemberian perizinan, antara lain:

* 1. simplifikasi kebijakan dan regulasi terkait perizinan.

1. percepatan pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin menjadi satu pintu baik di pusat maupun di daerah;
2. pemberlakuan standar layanan perizinan di seluruh daerah;
3. pengembangan dukungan infrastruktur untuk penerapan teknologi informasi dalam layanan perizinan; dan
4. penguatan partisipasi publik dalam penyelenggaraan layanan perizinan di pusat maupun daerah.
5. **Memperkuat upaya pencegahan KKN di dunia usaha**

Praktik KKN di dunia berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada komoditas pokok, sehingga menjadi beban, terutama bagi golongan ekonomi lemah. Berikut merupakan upaya kebijakan upaya pencegahan KKN di dunia usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah:

* 1. penguatan pengelolaan basis data pelaku usaha pada berbagai sektor strategis di tingkat pusat maupun daerah;
  2. penerapan sanksi yang tegas bagt pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan;
  3. pengembangan strategi komunikasi dan advokasi manajemen pencegahan korupsi di dunia usaha; dan
  4. pengembangan budaya integritas bagi pelaku usaha.

1. **Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pengelolaan keuangan**

Pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya menyangkut dua sisi utama yakni peneritaaan (*revenue*) dan belanja (*exvenditure*). Praktik KKN pada sisi penerimaan negara menjadi fokus, karena berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan negara serta pelayanan publik dan pembangunan menjadi tidak optimal dan tidak tepat sasaran. Tindakan KKN pada sisi belanja terutama pada proses penencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdampak pada tidak tercapainya target pembangunan nasional. Untuk itu, berikut merupakan beberapa upaya pencegahan KKN dalam dalam pengelolaan keuangan:

1. Teroptimalisasinya tata kelola penerimaan negara secara transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya kerasama pertukaran data keuangan dan perpajakan.
3. Terintegrasinya kebijakan, proses perencanaan, penganggaran dan kinerja birokrasi.
4. Mendorong pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.
5. Meningkatnya independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa.
6. Meningkatnya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
7. **Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi**

Penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi fokus, karena korupsi terkait penegakan hukum dan birokrasi sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. Berikut ini merupakan upaya pencegahan KKN dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi:

1. Semakin kuatnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis pada sistem informasi, meliputi:
2. percepatan sistem penanganan perkara yang berbasis teknologi informasi.
3. pengembangan sistem informasi lintas lembaga Penegak Hukum.
4. Semakin kuatnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan penegak hukum.
5. Terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi serta kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berintegritas.
6. Semakin menguatnya implementasi strategi pengawasan desa yang bersinergi, terarah, dan terpadu.
7. Terciptanya implementasi prinsip-prinsip pemerintahan terbuka (*open government*) dalam manajemen pemerintahan.
8. **Memperkuat program pendidikan anti korupsi di setiap lembaga pendidikan**

Penguatan program pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan lebih efektif ketimbang melakukan kampanye gerakan anti korupsi di setiap instansi pemerintah dan institusi penegak hukum. Hal tersebut karena praktik KKN di setiap instansi pemerintah dan institusi penegak hukum saat sudah membudaya, mengakar dan sudah menjadi lingkaran setan dan tentu sangat sulit apabila diberikan program pendidikan anti korupsi. Adapun adanya kampanye anti korupsi melalui pamflet-pamflet itu hanya sekedar slogan dan tentu tidak menjadi renungan.

Apabila ditinjau dari konsep tenaga pengajar, seperti seorang guru atau dosen, maka seharusnya memberikan informasi tentang bahaya laten dari korupsi, pengembangan sikap dasar siswa atau mahasiswa harus dilakukan ketika memasuki dunia pendidikan. Pencapaian informasi yang dapat direalisasikan dalam pemahaman mengenai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi dengan menggunakan argumen keilmuan baik bidang ekonomi, sosial, hukum, politik, dan budaya. Oleh karena itu, setiap argumen harus transformasikan ke dalam bahasa lebih mudah untuk menunjukkan bahwa perbuatan korupsi mengancam kepentingan kehidupan. Penyampaian informasi yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa harus diberikan secara kreatif dan inovatif. Setelah disampaikan informasi pengetahuan tentang bahaya laten dari perbuatan korupsi, maka tugas selanjutnya diemban oleh para agen perubahan yaitu mahasiswa. Mahasiswa menyampaikan kembali kepada masyarakat betapa bahayanya perbuatan korupsi dalam kepentingan kehidupan. Pemeberian informasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui dialog, Kuliah Kerja Nyata, Bina Desa, dan lain sebagainya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Perubahan sosial masyarakat dapat terjadi apabila mengubah cara berpikir masyarakat itu sendiri. Mengubah cara berpikir masyarakat bisa dilakukan dengan konsep pedagogi antikorupsi. Untuk itu pedagogi antikorupsi diartikan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada masyarakat.[[34]](#footnote-34)

Konsep Pedagogi antikorupsi dapat dilaksanakan di semua jalur pendidikan baik formal, nonformal maupun informal. Akan tetapi yang mempunyai otoritas dan kultur yang jelas adalah jalur formal yang sampai saat ini dipandang efektif untuk menyiapkan generasi muda berperilaku antikorupsi. Lebih dari itu pada tingkat informal, seperti kegiatan ekstra kurikuler dipandang lebih efektif karena suasana penyampaiannya tidak formal seperti dikelas.[[35]](#footnote-35)

Sinergi dengan pemikiran di atas, fokus utama pedagodi antikorupsi adalah membentuk kesadaran diri pribadi, maka lingkungan yang paling menguntungkan untuk itu adalah disiplin sosial, termasuk pendidikan Ilmu Hukum, Sejarah, Politik, Kewarganegaan, dan Etika. Interdisipliner ilmu tersebut, mempunyai peranan dalam menjelaskan bahaya laten dari perbuatan korupsi. Apabila penyampaian informasi diterima dengan baik oleh para agen perubahan, maka satu langkah awal telah tercapai untuk mengubah cara berpikir masyarakat.

Konsep pedagogi antikorupsi dalam jenjang pendidikan di Indonesia harus diatur secara jelas dan tidak menimbulkan interprestasi ganda oleh penerima atau pembaca. Sebagai contoh yang bisa diberikan dalam pembelajaran anti korupsi pada tingkatan Siswa Dasar (SD) teknik mencari pasangan, teknik bertukar pasangan, teknik berpikir berpasangan berempat, teknik berkirim salam dan soal, teknik kepala bernomor, teknik dua tinggal dua tamu, teknik keliling kelompok, teknik keliling kelas, teknik kancing gemerincing, teknik jigsaw dan teknik-teknik lainnya yang relevan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai.[[36]](#footnote-36)

Pedagogi antikorupsi di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Mengah Atas dapat menggunakan model penelitian sosial, simulasi, *brainstorming*, studi kasus, silang pendapat, *problem-centered group*, seminar group, *syndicate group*, debat, *team-quiz*, poster dan model-model lain yang relevan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai.[[37]](#footnote-37) Sama halnya dengan Perguruan Tinggi, konsep pedagogi antikorupsi dapat diintegrasikan ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar, atau dapat dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri.[[38]](#footnote-38)

Pemikiran lain mengenai strategi anti korupsi melalui pendekatan pendidikan formal dapat dilakukan melalui pendidikan berkarakter sebagai upaya penyelenggaraan pendidikan anti-korupsi. Kurikulum pendidikan antikorupsi merupakan konsep yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Seperti, konsep mata pelajaran tersendiri, konsep terintegrasi dalam semua mata pelajaran, luar pembelajaran, konsep pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah, dan kosep gabungan. Sedangkan untuk metode atau cara penyampaian nilai-nilai anti korupsi, dapat dilakukan dengan metode demokratis, pencarian bersama, siswa aktif atau aktivitas bersama, keteladanan, *live in*, dan penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.[[39]](#footnote-39)

Uraian di atas sebagai contoh penerapan pedagogi antikorupsi di sekolah sampai perguruan tinggi melalui jalur pembelajaran saja. Pedagogi antikorupsi dapat diwujudkan melalui kegiatan lomba tulis, baca puisi antikorupsi, lomba poster antikorupsi, lomba pidato antikorupsi, lomba geguritan antikorupsi, lomba dongeng antikorupsi, lomba kisah antikorupsi, lomba tulis cerpen antikorupsi, drama antikorupsi, lomba debat tentang korupsi, dan kegiatan lain yang lebih cair, segar, menyenangkan, bebas, menarik, menantang dan mendidik.

Sebagai studi komparatif dengan berbagai negara, penulis mengambil Negara Finlandia, karena negara tersebut terbilang relatif bersih dari korupsi. Ada 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan Finlandia bersih dari korupsi. *Pertama*, *obedience,* yaitu sikap taat atau patuh pada hukum. *Kedua*, *honesty*, yaitu sikap jujur pada diri sendiri dan orang lain. *Ketiga*, *life style* atau gaya hidup sederhana dan tidak konsumtif. Di Finlandia, sikap bohong tidak disukai oleh rakyat.[[40]](#footnote-40)

Harapan yang dituangkan dalam legalitas formal merupakan suatu konsep yang sangat baik, akan tetapi dalam kenyataannya sering terjadi tidak sinkronnya anatara harapan dan kenyataan. Butuh suatu usaha yang bisa mewujudkan pencegahan korupsi melalui sarana pendidikan. Usaha yang dilakukan adalah melakukan perubahan sosial yang dimulai dengan perubahan cara berpikir. Hal ini akan mustahil jika ingin ada perubahan ke arah yang benar kalau kesalahan berpikir masih menjebak masyarakat.

Teringat dua bait puisi yang berbunyi, “sekiranya kucing-kucing miskin diberikan sayap, maka kucing itu akan terbang dan menghabiskan semua telur burung pipit”. Bait tersebut mengajarkan bagaimana perubahan sosial pada tingkat individu dapat berpengaruh pada perubahan perilaku orang lain. Maka tidak benar bahwa kalau orang miskin diberi kekayaan akan menjadi baik. Juga, tidak benar kalau orang kaya dijarah lalu menjadi miskin akan berubah menjadi menjadi baik. Semua itu tergantung pada sumber daya manusianya.

Saat ini, pada kebanyakan rakyat Indonesia telah terjadi perubahan norma-norma secara *administrative*. Maksudnya adalah perubahan norma yang terjadi sebagai dampak dari perubahan organisasi sosial (perubahan prosedur) bukan kesalahan prosedur. Misalnya seorang PNS harus berhadapan dengan ketentuan bahwa bantuan dari pemerintah hanya diberikan kepada anak pertama dan kedua, selebihnya dari itu di luar tanggung jawab pemerintah. Berkaca dengan hal tersebut bisa saja atau patut diduga seseorang melakukan tindak pidana korupsi agar memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Cara lain yang bisa dilakukan untuk menanggulangi KKN melalui *non-penal* dengan mengedepankan konsep pedagodi antikorupsi melalui strategi persuasif (*persuasive strategy*). Dalam strategi ini, media massa bisa sangat berperan, karena pada umumnya strategi ini dijalankan melalui pembentukan opini dan pandangan masyarakat yang tidak lain melalui media massa.

Lebih lanjut strategi dalam penelitian ini penulis mengusulkan strategi *normative-reeducation* (normatif-reedukatif) yang dapat diartikan suatu aturan yang berlaku di masyarakat. Norma termasyarakatan lewat *education* (pendidikan). Oleh sebab itu, strategi normatif ini digandengkan dengan upaya *reeducation* (pendidikan ulang) untuk menanamkan dan mengganti paradigma masyarakat tentang bahaya korupsi bagi segala lini aspek kehidupan.

Setelah melihat konsep pendidikan untuk menanggulangi kejahatan korupsi yang sasarannya meliputi pendidikan formal, maka selanjutnya perlu dipahami mengenai pendidikan bagi orang tua dalam mengelola penggunaan kekayaan. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang miskin ketika menjadi kaya belum tentu akan menjadi baik maupun sebaliknya.

Masyarakat hari ini dalam konteks pikirannya sangat dipengaruhi oleh pola hidup yang berlebihan, tidak menjadi masalah bagi orang-orang yang terlahir dengan kekayaan yang lebih dari cukup, akan tetapi yang menjadi masalah adalah orang yang mempunyai kekayaan cukup harus mengikuti pola hidup orang yang mempunyai keuangan yang berlebih.

Konsep yang bisa dijalankan bagi orang tua atau masyarakat adalah konsep pola tengah penggunaan kekayaan. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan kekayaan harus memenuhi kewajaran, dalam arti lain kepribadian dan prihatin merupakan unsur solidaritas sosial. Selain itu, solidaritas sosial merupakan sikap yang memperhitungkan dan memperhati kan keadaan dan kepentingan orang banyak. Lebih dari itu harus terdapat keprihatinan dalam menggunakan harta pribadi digunakan sesuai kebutuhan hidup yang wajar, dan menyisihkan sebagian harta kekayaan untuk mendorong produktivitas masyarakat.

**BAB III**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Peranan politik hukum pidana dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sangatlah diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan praktek KKN dalam penyelenggaraan negara. Penggunaan politik hukum pidana dalam pencegahan KKN tidak lain bertujuan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Saat ini, upaya pencegahan terhadap praktik KKN di Indonesia masih mengacu pada Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Walaupun demikian, regulasi tersebut menyatakan bahwa kondisi umum hukum di Indonesia telah memberikan peluang terjadinya praktik-praktik KKN serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Atas permasalahan tersebut, maka langkah yag paling tepat saat ini ialah melakukan pembaruan hukum dalam pencegahan KKN di Indonesia. Konsep hukum sebagai sarana pembaruan harus mencerminkan bahwa kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan dengan keadilan, dan keadilan tidak boleh hanya ditetapkan sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan, melainkan harus sesuai dengan nilai-nilai yang baik yang berkembang dalam masyarakat.
2. Pengaturan pembaruan hukum dalam pencegahan KKN di Indonesia harus sesuai dengan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofis dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya ada 5 (empat) langkah dan upaya dapat dikembangkan dalam melakukan pencegahan KKN di Indonesia ke depan yaitu melalui: 1) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pemberian perizinan; 2) Memperkuat upaya pencegahan KKN di dunia usaha; 3) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam pengelolaan keuangan; 4) Memperkuat upaya pencegahan KKN dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi; dan 5) Memperkuat program pendidikan anti korupsi di setiap lembaga pendidikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku**

Achmad Ali, *Menguak tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002

A. Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Alumni, Bandung, 2012

Arimbi HP dan Emmy Hafild, *makalah : Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiend of the eart (FoE)*, Indonesia, 1999

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

B.A. Oktavira dan Y. T. Muryanto, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Harta (Boedel) Pailit Terhadap Sita Perkara Pidana*, Jurnal Privat Law, 8(1), 2020

Edward A. Haman, *How To File Your Own Bankruptcy ( or How To Avoid It),* Sixth Edition, Sphinx Publishing, United States of America, 2005

Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Penerbit: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan Cetakan ke-2*., Prenadamedia Group, Jakarta, 2009

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*,  Bandung, 2001.

Khudzaifah Dimyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005

Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2014

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994

Marianne Termorshuizen*, Kamus Hukum Belanda-Indonesia,* Djambatan, Jakarta, 1999

Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Kesatu, Reality Pubilser, Surabaya, 2009

Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata,* Djambatan, Jakarta, 2005

Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Teori-Teoris Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017

M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan penerapan sita jaminan (conservatoir beslag),* Pustaka, Bandung, 1990

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan),* Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta, 2006

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004

Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Bayu Media, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007

R. Anto Suryatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

##### Ratna Nurul Afiah, *Barang bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mendudukkan Undang-Undang Dasar*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Cetakan 1, CV. NUANSA AULIA, Bandung 2006

Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditur dan Debitor dalam Hukum Kepailitian di Indonesia studi Putusan-Putusan Pengadilan*, Total Media, Yogyakarta, 2008

SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, MuMa, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002

Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Cet XXXV, 2013

Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1986

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, edisi ke-3, 1991

Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, 1982

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008

Wildan Suyuthi, *Sita dan Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002

1. **Peraturan Perundang-undangan**
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, tanggal 11 September 2014.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 202 PK/Pdt. Sus/2012.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 31 Januari 2019
4. Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid.B/2018/PN.Dpk
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 105/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst.
6. **Sumber-sumber Lainnya**

Anggar Septiadi, 4 Juni 2018, *“Aset First Travel Dirampas Negara, Korban Terancam Gigit Jari”,* https://ekonomi. kompas.com/read/2018/06/04/080800726/aset-firsttravel-dirampas-negara-korban-terancam-gigit-jari

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Dalam 4 Lingkungan Peradilan, Edisi 2013, Mahkamah Agung RI, 2013

Deliana Pradhita Sari, 13 November 2017, *“Lelang Harta Pailit: 4 Bank Eksekusi Aset Cipaganti”,* http:// kalimantan.bisnis.com/read/20171113/439/708355/ lelang-harta-pailit-4-bank-eksekusi-aset-cipaganti.

Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (online) http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-6-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005

Dian Cahyaningrum, *Tanggung Jawab Hukum First Travel Dalam Kasus Penipuan, Penggelapan, Dan Pencucian Uang Dengan Modus Umrah*, Majalah Info Singkat Hukum Vol. IX, No. 16/II/Puslit/Agustus/2017

D. Soekarno, *Amandemen Terhadap UUD 1945*, Suara Pembaharuan, 1996, http/www. Suarapembaharuan.com

Emmy Yuhassarie (Ed), *Prosiding Lokakarya Terbatas Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2015

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 19 No.3 Oktober 2007

Heru Setiana, (Lapas Bojonegoro), “*Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum*”, Warta Masyarakat

Jhon Pridol dan Firman Wijaya, *Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara*, Jurnal Adigama Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

Marwanto, *Formulasi Kebijakan Hukum Pemulihan Fungsi Lembaga Kepailitan Sebagai Lembaga Penyelesaian Kewajiban Debitor*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016

Parwoto Wignjosumarto*, Peran dan Hubungan Hakim Pengawas dengan Kurator/Pengurus serta Permasalahannya dalam Praktik Kepailitan dan PKPU*, Makalah Loka karya Kurator dan Hakim Pengawas Tinjauan Secara Kritis, Jakarta, 2002

Riyanto, *Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan Dalam Perseroan Terbatas*, Makalah Seminar Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Seogijapranata, 1996

Serlika Aprita, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, Disertasi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019

Siti Hapsah Isfardiyana, *“Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit”,* *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 635, http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/ viewFile/7177/5419.

Siti Ismijati Jenie*, Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 September 2007

Syahariska Dina, “*Tinjauan Yuridis terhadap Sita Umum dalam hukum Kepailitan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 157/k/Pdt.Sus/2012”,* *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014, v. http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/61367/ Cover.pdf?sequence=6

1. Moh. Mahfud MD, *Capaian dan Proyeksi Hukum di Indonesia (I),* Makalah disampaikan pada acara seminar “Refleksi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Terhadap Kondisi Hukum di Indonesia”. Yogyakarta, 16 Februari 2009, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Iskandar, *Mentalitas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Suatu kajian dari perspektif Konsep Etika Uber Ich Sigmund Freud dan Good Governance)* <http://repository.unib.ac.id/7808/> [↑](#footnote-ref-2)
3. Dwiyanto, dkk., Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2003, hlm. 106. [↑](#footnote-ref-3)
4. I Gde Pantja Astawa, Hak Angket Dalam Sistem Ketata Negaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Disertasi, UNPAD, Bandung, 2000, hlm. 225 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bryn Carless, *Corrupttion in the police: the reality of the “dark side”,* Police Jurnal, 2008, hlm. 5. Diunduh dari : <https://1.next.westlaw.com/Document/> [↑](#footnote-ref-5)
6. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy),* Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy),* Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm.1. [↑](#footnote-ref-9)
10. F. Sugeng Istanto dalam Abdul Latif dan Hasbi ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abdul Wahab, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesi, 2012, hlm.27. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mahfud MD, *Politik Hukum… Op.cit*, hlm.31. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-13)
14. Zainuri dalam Mas Putra Zenno Januarsyah, *Penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011*, Jurnal Yudisial Vol 10 No 3 Desember 2017, Komisi Yudisial, 2017, Jakarta, hlm 264. [↑](#footnote-ref-14)
15. Lihat hasil surver dari Transparansi International, *Corruption Percep tion Index*, https://ti.or.id/corruptionpercep tionindex-2018/. [↑](#footnote-ref-15)
16. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.. Op.cit*. hlm. 30. [↑](#footnote-ref-16)
17. Teguh dan Aria, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-17)
18. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Prenada Madia Group, Jakarta, 2010, hlm. 29-30. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*, hlm. 7-8. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lihat Romli Atmasasmita, *Moral Pancasila, Hukum dan Kekuasaan*, Refika Aditama, Bandung, 2020. [↑](#footnote-ref-20)
21. A.Z. Abidin, *Bunga Rampai.. Op.cit*, hlm. iii. [↑](#footnote-ref-21)
22. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.. Op.cit*. hlm. 29. [↑](#footnote-ref-22)
23. Andi Febriansyah Al Sabah AZ, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al Daulah Vol 6 No 1, 2017, hlm.206. [↑](#footnote-ref-23)
24. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.. Loc.cit* [↑](#footnote-ref-24)
25. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.153. [↑](#footnote-ref-25)
26. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.165. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*, hlm.163. [↑](#footnote-ref-27)
28. Sudarto, *Loc.Cit.*  [↑](#footnote-ref-28)
29. Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum,* Kompas, Jakarta, 2002, hlm.74. [↑](#footnote-ref-29)
30. Paul Knepper, *Criminology and Social Policy*, Sage Publication, London, 2007, hlm.4. [↑](#footnote-ref-30)
31. Edwin H Sutherland, dan Donald R. Cressey, *Principle of Criminology,* J.B. Lippincot Company, Chicago-New York, 1955, hlm.629. [↑](#footnote-ref-31)
32. Steven P. Lab, *Crime Prevention: Approaches, Practices, and Evaluations*, Lexis Nexis Group, New York, 2010, hlm.27-29. [↑](#footnote-ref-32)
33. Hariman Satria, *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum di Indonesia,* Jurnal Integritas, 5 (1), 2019, hlm.11. [↑](#footnote-ref-33)
34. Totok Suyanto, *Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah*, JPIS Vol 23 No 8 Edisi Juli – Desember 2005, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Bandung, 2005, hlm.43. [↑](#footnote-ref-34)
35. Eko Handoyono, *Pendidikan Anti Korupsi*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.44. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid.,* hlm 50. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.,* hlm 51. [↑](#footnote-ref-38)
39. Ahmad Zuber, *Strategi Anti Korupsi melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Journal of Development and Social Change, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret, 2018, Surakarta, hlm.189. [↑](#footnote-ref-39)
40. Bambang Suryadi, *Belajar dari Pemberantasan Korupsi di Negara Lain*, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006,hlm. 192. [↑](#footnote-ref-40)